

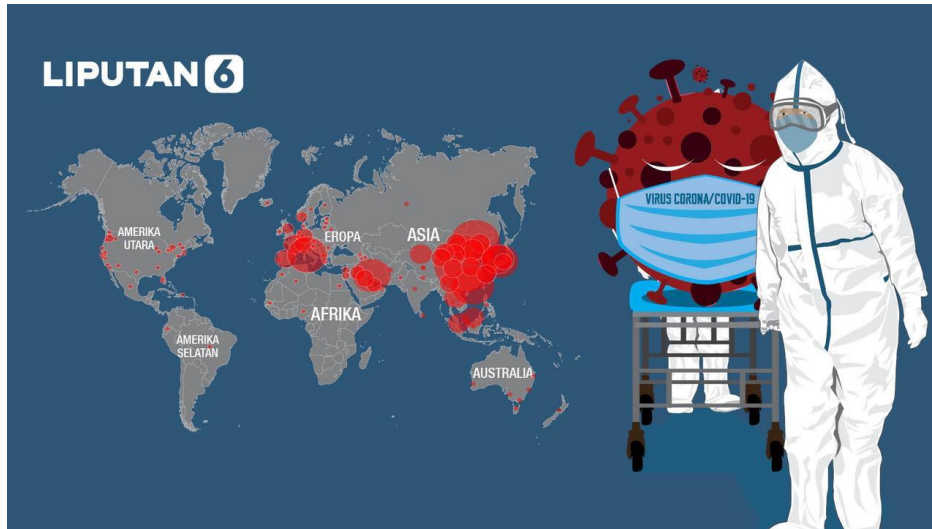
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus positif Covid-19 mulanya dilaporkan oleh pemerintah China pada Desember 2019 kepada WHO, kejadian ini awalnya tidak dianggap sebagai ancaman global. Namun penyebaran Covid-19 sangat cepat meluas ke berbagai negara di dunia. Hal ini dikarenakan aktifnya mobilitas penduduk dunia, dimana setiap individu dapat berpindah dari satu negara ke negara lain dalam waktu singkat dengan menggunakan akses transportasi modern.

Gambar 1.1
Persebaran Covid-19 di Dunia



Sumber : Liputan6.com , 20 Maret 2020

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Covid-19 telah menginvasi Italia, Iran, Korea Selatan, Spanyol bahkan Amerika Serikat sabagai negara adidaya tak luput dari serangan Covid-19. Sejak pertama kali ditemukan, lebih dari 7 juta orang di dunia yang

terinfeksi dan menyebabkan 400 ribu orang meninggal dunia akibat Covid-19. (akbara 8/06/20)

Gambar 1.2
Penyebaran Covid-19 di Indonesia



Sumber : Covid19.go.id (Data BNPB , 28 Maret 2020)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 terdeteksi masuk ke Indonesia ditandai dengan ditemukannya kasus positif Covid-19 pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 (kumparan.com). Awalnya positif covid-19 hanya ditemukan DKI Jakarta, kemudian dalam rentang waktu yang singkat penularan covid-19 terus meningkat dengan menginfeksi banyak orang. Hal ini membuat pemerintah berinisiatif untuk membuat kebijakan yang dimaksudkan untuk mengurangi interaksi antar manusia yang menjadi salah satu faktor cepat menyebarnya covid-19.

Akibat yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan saja, melainkan juga berdampak luas ke semua aspek kehidupan manusia. Kejadian Covid-19 yang terjadi sangat mendadak dan tidak di prediksi akan menjadi pandemi bagi dunia. Tentunya keadaan ini mengharuskan manusia melakukan adaptasi perilaku untuk dapat tetap *survive* melewati masa pandemi. Perubahan perilaku dilakukan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, ditandai dengan munculnya beberapa istilah baru yang ada di masa pandemi, seperti *sosial distancing*, *physical distancing*, *work from home*, hingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Perubahan perilaku tersebut menyebabkan terjadinya perubahan peradaban manusia dalam segala aspek kehidupan, tak terkecuali dalam dunia pendidikan.

Aktivitas kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya menggunakan metode pembelajaran tatap muka langsung di kelas, harus beradaptasi dengan metode pembelajaran *daring* yang dilakukan dengan menggunakan perangkat digital yang disokong oleh koneksi internet. Begitupun metode pembelajaran di hampir semua perguruan tinggi yang ada di zona merah Covid-19 dilakukan secara *daring*, lebih dikenal dengan sebutan kuliah *daring*. Kuliah *daring* atau sistem perkuliahan yang dilakukan *online* adalah sebuah metode belajar mengajar dimana dosen dan mahasiswa tidak bertatap muka secara langsung, melainkan proses perkuliahan nya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti *Google Meet*, *Zoom*, *Microsoft Teams* dan sebagainya. Dalam kuliah *daring* mahasiswa tidak diharuskan untuk datang ke kampus setiap ada mata kuliah, karena dapat dilakukan dari jarak jauh melalui ruang *virtual*.

Konsep kuliah *daring* melalui fasilitas pembelajaran *E-Learning* sebenarnya telah ada sejak lama, jauh sebelum pandemi Covid-19 muncul. Kuliah *daring* diperkenalkan sebagai konsep pembelajaran masa depan, karena program perkuliahan secara *daring* memiliki beberapa keuntungan. Kuliah *daring* memudahkan para pekerja yang ingin melanjutkan pendidikan dapat dilakukan secara *virtual* tanpa hadir di kelas langsung. Pelajar dapat melanjutkan pendidikan di universitas yang ada di luar daerah atau bahkan universitas di luar negeri tanpa harus meninggalkan rumah dan keluarganya, hal ini tentunya dapat menghemat biaya yang dikeluarkan, karena tidak perlu membayar sewa kos dan juga transportasi ke kampus. Kuliah *daring* dapat dilakukan dengan bermodalkan laptop/perangkat komputer ditambah dengan koneksi internet, maka mahasiswa sudah dapat mengikuti perkuliahan secara *daring*.

Perguruan Tinggi di luar negeri telah mengembangkan dan menerapkan metode kuliah *daring* sejak lama. Program kuliah *daring* dapat memudahkan mahasiswa yang berasal di seluruh penjuru dunia untuk mengikuti perkuliahan dari jarak jauh. Penerapan pembelajaran *daring* di beberapa kampus tersebut disambut dengan antusias oleh mahasiswa di seluruh dunia. Beberapa kampus di luar negeri yang telah menerapkan program kuliah *daring* (*online*) antara lain, Universitas New Mexico di Amerika Serikat dengan program UNM Learn yang menawarkan program kuliah *daring* dengan kualitas lulusannya yang cukup terkenal di seluruh dunia. Proses pembelajaran *daring* yang diterapkan oleh kampus ini cukup fleksibel, walaupun pembelajaran dilakukan secara *daring*, namun kampus berkomitmen agar lulusan kuliah *daring* memiliki kualitas yang sama dengan kualitas lulusan kuliah konvensional.

Fasilitas yang mumpuni dan kualitas pembelajaran secara *daring* yang bagus juga disediakan oleh *The Ohio State University*, Columbus AS. Kampus OSU yang berdiri lebih dari 150 tahun yang lalu ini memiliki layanan program kuliah untuk sarjana secara *daring* dengan kualitas yang bagus, dimana dosen-dosen bukan hanya melakukan pembelajaran saja, tetapi juga membantu mahasiswa untuk mendapatkan karir yang bagus.

University Of Oregon (UO) Eugene AS juga memberlakukan kuliah *online* yang terakreditasi *Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU)*. Program kuliah *daring* ditawarkan untuk beragam program studi, sehingga memberikan mahasiswa kesempatan untuk mendapatkan gelar dari mana saja melalui koneksi internet. Universitas menyediakan beragam fasilitas *online* untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Program tersebut disampaikan melalui sistem manajemen program Canvas (merupakan elemen baru pada teknologi HTML 5), tetapi mahasiswa juga perlu mengikuti ujian langsung yang diawasi.

Beberapa kampus di Indonesia yang telah menerapkan perkuliahan secara *daring* misalnya saja universitas Bina Nusantara yang menyediakan program kuliah *daring* dengan nama *Binus Online Learning*, program studi *daring* di Binus antara lain S1 Akuntansi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S2 Teknik Informatika, S2 Sistem Informasi, S2 Teknik Industri. Perkuliahan *daring* yang ada di Binus di selenggara kan sejak tahun 2008 dengan terus melakukan perbaikan sistem sesuai kebutuhan di lapangan. Universitas Mercu Buana juga menyediakan program kuliah *daring* yang diperuntukkan bagi karyawan yang hanya bisa kuliah di akhir pekan, sehingga perkuliahan di hari kerja dilakukan secara *online* guna memudahkan aktivitas

kerja karyawan. Universitas Indonesia juga menerapkan sistem kuliah *daring* sejak tahun 2002, melalui konsep belajar pendidikan jarak jauh (pjj) yang ditawarkan, mahasiswa bisa mengambil beberapa kredit sks secara *daring* dengan perangkat pembelajaran *online* yang disediakan. Universitas Al-Azhar Indonesia juga menyediakan program kuliah *daring*. Program perkuliahan *online* yang tersedia di kampus Al-Azhar Indonesia yaitu jurusan S1 Akuntansi dan S1 Manajemen.

Menyikapi meluasnya penyebaran pandemi Covid 19, dimana mengharuskan semua orang untuk membatasi aktivitasnya di luar rumah. Komisi X DPR RI melalui Wakil Ketuaanya, Abdul Fikri Fakhri meminta Mendikbud mempertimbangkan opsi untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar secara langsung baik di sekolah maupun di kampus, sebagaimana telah di rekomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia (*WHO*). Oleh karena itu Mendikbud Nadiem Anwar Makarim meliburkan aktivitas pembelajaran tatap muka langsung di kelas mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta dan menggantikannya dengan pembelajaran *daring* untuk daerah yang terdampak pandemi Covid 19. Hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran Mendikbud dengan Nomor: 36962/MPK.A/HK/2020, yang isinya mengharuskan Pembelajaran secara *Daring (online)* dari rumah bagi siswa juga mahasiswa dan Bekerja dari Rumah (*Work From Home*) bagi guru dan dosen. Untuk melakukan aktivitas belajar mengajar secara *daring* dapat melalui konferensi video, dokumen digital maupun sarana *online* lainnya dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di daerah-daerah yang sudah terdampak pandemi Covid-19. Surat Edaran tersebut ditanda tangani Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 17 Maret 2020 di Jakarta.

Surat Edaran Mendikbud tersebut menjadi pedoman bagi seluruh Perguruan Tinggi yang ada di daerah terdampak Covid-19 atau daerah zona merah pandemi untuk menggunakan metode perkuliahan secara *daring*, termasuk Universitas Diponegoro. Merespon Surat Edaran Mendikbud tersebut, Rektor Universitas Diponegoro mengeluarkan Surat Edaran Rektor Nomor 20 /UN.7.P/SE/2020 pada tanggal 14 Maret 2020. Isi dalam surat edaran mengenai kuliah *daring* antara lain :

1. Kegiatan perkuliahan dan pembimbingan/asistensi yang dijadwalkan tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 21 Maret 2020 ditunda pelaksanaannya dan akan dilaksanakan pada waktu yang lain.
2. Pada tanggal 16 sd 21 Maret 2020 mahasiswa tidak perlu hadir dikampus, sementara kegiatan administrasi kepegawaian lainnya tetap berjalan seperti biasa.
3. Kegiatan perkuliahan dan pembimbingan/asistensi setelah tanggal 21 Maret 2020 akan dilaksanakan dengan pola *daring (online)*.
4. Pelaksanaan kegiatan perkuliahan dan pembimbingan dilakukan secara *daring* sampai akhir semester I atau dalam batas waktu tertentu dengan memperhatikan kondisi yang ada.
5. Pola perkuliahan *daring* dan pembimbingan/asistensi bersifat opsional artinya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai kaidah yang berlaku dengan tetap memperhatikan *learning outcome*.

6. Para pemimpin Fakultas/sekolah menentukan bentuk perkuliahan praktik dengan tetap mengacu pada penghindaran tatap muka secara langsung. Jika pelaksanaan perkuliahan praktik tidak dapat dihindari maka wajib melakukan mitigasi pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah.
7. Para pemimpin Fakultas/Sekolah wajib memastikan keberhasilan pelaksanaan perkuliahan dan pembimbingan/asistensi dengan pola *daring*.

Surat Edaran Rektor Rektor Undip No. 20/UNJ.7.P/SE/2020 sebagai dasar implementasi kuliah *daring* di Universitas Diponegoro (UNDIP) ketika pandemi Covid 19 masih berlangsung. UNDIP resmi menghentikan kegiatan belajar mengajar di kampus dengan meliburkan mahasiswanya mulai Senin, 16 Maret 2020. Setelah libur selama sepekan, berdasarkan Surat Edaran Rektor Undip No. 20/UNJ.7.P/SE/2020, pemberlakuan kuliah *daring* bukan hanya bagi mahasiswa yang masih aktif kuliah, tetapi juga untuk mahasiswa bimbingan skripsi dan tugas akhir. Pembimbingan oleh dosen dilakukan jarak jauh secara *daring*, sedangkan kegiatan praktikum yang mengharuskan di laboratorium wajib menerapkan protokol kesehatan ketat yang mulai diberlakukan sejak tanggal 23 Maret 2020.

Gambar 1.3

Suasana Gerbang Masuk Universitas Diponegoro Yang Sepi



Sumber : inibaru.id

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa sepi nya gerbang masuk ke Fakultas-fakultas Universitas Diponegoro. Hal ini menandakan tidak ada kegiatan belajar mengajar secara tatap muka secara langsung di kelas, karena kegiatan perkuliahan dan pembimbingan dilakukan secara *daring* sampai akhir semester ganjil atau dalam batas waktu tertentu dengan memperhatikan kondisi yang ada.

Tujuan implementasi kuliah *daring* di Universitas Diponegoro agar dosen dapat tetap memberikan perkuliahan dan pembimbingan/asistensi kepada mahasiswa di masa pandemi, sehingga mahasiswa tidak ketinggalan materi perkuliahan dengan waktu belajar yang fleksibel. Walaupun perkuliahan dan pembimbingan/asistensi tidak dengan metode tatap muka langsung di kelas, serta dosen diperkenankan menggunakan pola perkuliahan yang bersifat opsional artinya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk

sesuai kaidah yang berlaku, namun dengan tetap memperhatikan *learning outcome*, sehingga mahasiswa dapat menjadi generasi muda yang produktif dan kompetitif.

Implementasi kuliah *daring* juga bertujuan untuk menjaga dan melindungi kesehatan civitas akademika dan mencegah kampus menjadi *cluster* baru penyebaran Covid-19. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 79 tentang kesehatan, diamanatkan untuk menjaga kesehatan civitas akademika. Komisi X DPR RI melalui Wakil Ketuaanya, Abdul Fikri Fakhri dalam keterangannya, pada Rabu 4 Maret 2020 mengatakan, “Meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun kampus dalam masa karantina yang ditentukan otorita setempat merupakan salah satu rekomendasi WHO yang bertujuan untuk meminimalkan pandemi virus Corona.” (CNN Indonesia). Oleh karena itu implementasi kuliah *daring* menjadi pilihan yang paling realistis saat pandemi.

Rektor Universitas Diponegoro juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 23/UN7.P/SE/2020 tanggal 30 Maret 2020, tentang Proses Belajar Mengajar saat Pandemi Covid-19 secara *daring* yang isinya antara lain :

1. Bentuk kuliah *online* selama masa pandemi Covid-19 dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. *Streaming* video interaktif dan *non* interaktif
 - b. *Live chat non* video, dan atau
 - c. Pengiriman file materi kuliah dan tugas dalam bentuk pdf, png, ppt atau bentuk lainnya.

2. Dosen memilih bentuk kuliah *online* berdasarkan kesepakatan dengan mahasiswa peserta kuliah.
3. Dosen wajib memfasilitasi mahasiswa untuk presensi perkuliahan dan penyediaan materi kuliah sebagaimana disebut dalam angka 1.
4. Dosen dalam memberikan tugas wajib mempertimbangkan proporsionalitas serta *learning outcome*.
5. Dalam hal dosen melaksanakan kuliah *online* dalam bentuk *video streaming* interaktif hanya boleh maksimal 15 menit selama perkuliahan berlangsung (kecuali atas persetujuan seluruh peserta mahasiswa).
6. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dapat dilakukan melalui fasilitas chat maupun fitur lainnya pada aplikasi yang relevan digunakan untuk kuliah *online*.
7. Bentuk ujian tengah semester diserahkan kepada masing-masing dosen dan berkoordinasi dengan kaprodi masing-masing.

Surat Edaran Nomor 23/UN7.P/SE/2020 dapat dikatakan sebagai *Standard Operating Procedure* (SOP) dari implementasi kuliah *daring* di Universitas Diponegoro. Dosen diberi kebebasan untuk dapat memilih bentuk perkuliahan sesuai kesepakatan dengan mahasiswa sebagai peserta kuliah. Kuliah *daring* dapat dilakukan dengan fasilitas chat maupun aplikasi yang relevan digunakan untuk kuliah *daring*. Namun mulai awal semester ganjil (Agustus) 2020 hingga seterusnya, dekanat mewajibkan penggunaan aplikasi “Kulon Undip” untuk digunakan sebagai salah satu sistem media kuliah *daring*.

Aplikasi Kulon Undip (kuliah *online* Universitas Diponegoro) adalah *Learning Management System* (LMS) yang merupakan media untuk pembelajaran *daring* di

Universitas Diponegoro. Para dosen diminta untuk menggunakan aplikasi Kulon Undip sebagai sarana pembelajaran. Aplikasi Kulon Undip terbaru sudah diintegrasikan dengan SSO (*single sign on*). SSO adalah sebuah sistem terintegrasi yang menghubungkan civitas akademika Undip dengan beberapa sumber daya dan fasilitas IT yang disediakan oleh Universitas Diponegoro. SSO ini dibuat untuk memudahkan bagi pengguna layanan ini dalam melakukan aktivitas akademik berbasis IT.

Implementasi kuliah *daring* memberikan kelebihan bagi dosen dan mahasiswa dari sisi waktu perkuliahan yang fleksibel dan juga saat perkuliahan tidak perlu hadir secara fisik di kelas. Di beberapa negara, hasil perkuliahan *daring* bahkan cenderung lebih, di mana mahasiswa dapat memaksimalkan belajar dengan mengulang materi kuliah di dengarkan ulang atau dapat membaca ulang materi kuliah. Mahasiswa juga menjadi bisa lebih mandiri dan bertanggungjawab untuk mengatur waktu agar dapat mengikuti kelas *daring* yang fleksibel, sehingga dapat memenuhi target pembelajaran. Selain itu mahasiswa dituntut mempunyai kemampuan literasi digital melalui internet.

Dosen berperan sebagai fasilitator bagi mahasiswa di dalam perkuliahan *daring*. Dosen berperan membantu mahasiswa memahami materi kuliah yang diberikan secara *daring*. Kecakapan atau keterampilan dosen dalam penguasaan teknologi informasi yang berfungsi sebagai media untuk *transfer* ilmu pengetahuan melalui aplikasi *online* saat kuliah *daring* juga dibutuhkan, agar dosen dapat mengemas penyampaian materi kuliah dengan lebih menarik, sehingga mahasiswa antusias dalam mengikuti kelas *daring*.

Kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam implementasi kuliah *daring* dapat dimaksimalkan baik oleh mahasiswa maupun dosen untuk mendapatkan *learning outcome* yang maksimal. Saat implementasi kuliah *daring* mahasiswa yang saat kuliah tatap muka tidak aktif, terlihat menjadi lebih aktif dalam diskusi-diskusi, serta aktif dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dosen. Pencapaian pembelajaran dapat terindikasi salah satunya dari peningkatan nilai IPK mahasiswa, selain itu dapat dilihat dari penguasaan dan pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah yang disampaikan dosen melalui perkuliahan *daring*.

Implementasi kuliah *daring* di Universitas Diponegoro telah diatur sedemikian rupa dalam Surat Edaran Rektor Nomor 20 /UN.7.P/SE/2020 dan Surat Edaran Nomor 23/UN7.P/SE/2020 sebagai *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk implementasi kuliah *daring*, namun tetap saja belum dapat menjamin kuliah *daring* di Universitas Diponegoro tanpa masalah. Mahasiswa S1 sederajat yang paling merasakan imbas, karena menemui beberapa kendala saat terjadi pergantian metode pembelajaran dari kuliah tatap muka di kelas menjadi kuliah *daring*. Hal tersebut karena mahasiswa S1 sederajat terbiasa belajar di kelas, sehingga dapat berinteraksi secara langsung dengan dosen juga teman sekelas, hal ini membuat mahasiswa tidak mengalami kebosanan saat melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka langsung.

Permasalahan yang muncul dalam implementasi kuliah *daring* di Universitas Diponegoro saat pandemi Covid-19 dikarenakan model kuliah *daring* merupakan suatu metode pembelajaran yang baru bagi dosen dan mahasiswa. Implementasi kuliah *daring* yang dilakukan secara mendadak dengan waktu penyesuaian yang sempit dan tanpa diujicobakan terlebih dahulu membuat dosen dan mahasiswa belum dapat

beradaptasi dengan metode pembelajaran secara *daring*. Sehingga, tidaklah mudah bagi dosen dan mahasiswa untuk dapat melakukan kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan aplikasi daring yang tersedia dalam proses pembelajaran yang harus tetap memperhatikan capaian pembelajaran (*learning outcome*).

Kuliah *daring* menjadi tantangan tersendiri bagi dosen dan mahasiswa untuk melakukan program pembelajaran dengan media *online* yang merupakan suatu metode pembelajaran yang baru. Tidaklah mudah bagi dosen untuk memindahkan pembelajaran tatap muka di kelas normal kedalam layar *virtual*. Dosen perlu menyesuaikan materi pembelajaran yang harus diubah dalam format *daring* dengan kemasan yang menarik bagi mahasiswa. Dosen harus dapat menyampaikan materi perkuliahan melalui dunia maya dan nantinya harus tetap dapat dipahami dan dimengerti oleh mahasiswa sebagai *audience*. Bagi beberapa dosen metode pembelajaran kuliah *daring* merupakan tantangan baru untuk melakukan pembelajaran dengan Teknik-teknik 4.0, karena masih ada sebagian dosen yang “gagap” menggunakan aplikasi digital yang digunakan dalam metode perkuliahan *daring*.

Mahasiswa yang masih aktif kuliah, pembelajaran melalui metode kuliah *daring* selama masa pandemi masih menemui beberapa kendala. Perkuliahan secara *daring* dengan kelas *virtual* juga menuntut kecakapan berliterasi secara digital bagi mahasiswa untuk dapat menguasai materi kuliah yang diberikan secara *daring* oleh dosen pengampu, namun sayangnya banyak mahasiswa yang belum mempunyai kesadaran untuk berinisiatif menambah waktu, serta membiasakan diri untuk menambah wawasan dengan literasi secara digital. Hal ini dikarenakan mahasiswa masih terpaku dengan kebiasaan pola pembelajaran konvensional secara tatap muka

langsung, di mana dosen selalu memberikan arahan langsung untuk materi kuliah dan mahasiswa dapat mencari bahan untuk literasi di perpustakaan.

Kewajiban *live streaming* dengan durasi 15 menit seperti yang tertulis dalam Surat Edaran Rektor, masih menjadi polemik mengenai keefektifannya untuk menggantikan kuliah tatap muka di kelas. Saat melaksanakan kuliah *daring*, masih ada beberapa dosen yang menjelaskan melalui aplikasi *room chat* di *WhatsApp* grup (WAG). Penyampaian materi kuliah melalui aplikasi chat *whatsapp group* kurang dapat diterima dengan maksimal oleh mahasiswa, karena akan sangat berbeda jika dijelaskan dalam perkuliahan tatap muka langsung. Penggunaan aplikasi *Ms.Team* atau *Zoom* untuk *live streaming* kuliah *daring* seringkali terkendala jaringan internet yang tidak sama baik di setiap daerah tempat tinggal mahasiswa, bahkan ada mahasiswa yang harus mencari sinyal jaringan sampai ke hutan atau sungai, karena di tempat tinggalnya berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), sehingga tidak mendapat sinyal jaringan internet yang baik.

Kesiapan dan kesiapan tenaga IT untuk memberikan pelayanan yang baik bagi para pengguna dalam melakukan aktivitas akademik berbasis IT. Selain itu tenaga IT dibutuhkan untuk terus memperbaharui dan meningkatkan aplikasi yang digunakan untuk sarana kuliah *daring*. Mahasiswa juga mengeluhkan kesiapan sarana dan prasarana penunjang implementasi kuliah *daring* yang dianggap belum layak. Kuliah *daring* di Universitas Diponegoro saat awal hanya menggunakan aplikasi *Microsoft Teams* (*Ms Teams*) saja, namun kemudian ada keharusan menggunakan aplikasi “Kulon Undip” untuk kuliah *daring*. Hal ini menyebabkan dosen dan mahasiswa harus menggunakan dua aplikasi yaitu, *Ms Teams* untuk *video streaming* dan Kulon Undip

untuk tugas, kuis dan materi kuliah. Kebijakan yang mengharuskan penggunaan aplikasi Kulon Undip sebagai salah satu media kuliah *daring* dikeluhkan oleh mahasiswa, mereka merasa terbebani saat harus menggunakan dua aplikasi. Selain itu website Kulon Undip memang belum menyediakan fitur selengkap yang terdapat pada *Ms Teams*. Mahasiswa dan dosen merasakan lebih lancar menggunakan aplikasi *Ms Teams* dibandingkan aplikasi Kulon Undip.

Berikut tanggapan mahasiswa dan dosen mengenai penggunaan aplikasi Kulon Undip :

1. Mahasiswa dari jurusan satra Indonesia FIB, menyatakan keberatan saat penggunaan aplikasi Kulon Undip, “Sebenarnya kebijakan itu dibuat pastinya bertujuan untuk memudahkan, tetapi faktanya di lapangan tidak bisa disamaratakan, karena membuat ribet ketika harus bolak balik membuka aplikasi *Ms Teams* untuk *video call*, pembelajaran *coference* dan Kulon Undip untuk tugas, kuis, materi dan segala macamnya. Jika ditanya memberatkan atau semakin mudah, menurutku memberatkan, karena saat awal kuliah *daring* kita cuma pakai *Ms teams*, jadi kita fokus disana,” ungkapnya. (Hayamwuruk29/08/2020)

2. Salah satu mahasiswa yang enggan disebutkan namanya memberikan tanggapan yang berbeda mengenai pemberlakuan aplikasi Kulon Undip. Ia mengatakan, “Bahwa dengan adanya Kulon Undip, kemungkinan Undip ingin memiliki sistem yang lebih terintegrasi, jadi semua terhimpun dalam satu *server*. Namanya juga instansi kan punya data, kerahasiaan data, sehingga Undip mempunyai sistem yang dapat dikontrol langsung untuk kegiatan belajar mengajar” (Hayamwuruk29/08/2020)

3. Dosen Ilmu Perpustakaan Undip, juga merasa keberatan dengan penggunaan aplikasi Kulon Undip, “Iya lebih ribet ya. Bukan hanya dari sisi mahasiswa, saya dari sisi dosen juga sebenarnya keberatan dua aplikasi, kenapa ngga cukup satu saja. Kalo saya pribadi belum menggunakan Kulon Undip. Saya sudah *explore* Kulon Undip di beberapa mata kuliah saya, tapi saya belum meminta mahasiswa saya untuk menggunakan Kulon.” (Hayamwuruk29/08/2020)

Implementasi kuliah *daring* di Universitas Diponegoro dikeluhkan tidak hanya oleh mahasiswa yang masih aktif kuliah (mahasiswa semester awal dan pertengahan), namun juga dikeluhkan oleh mahasiswa lama (semester akhir). Mahasiswa semester akhir yang sedang menyusun skripsi atau menyusun tugas akhir menemui kendala saat melakukan bimbingan dengan dosen secara *daring*.

1. Mahasiswa Program Studi Arsitektur Undip mengatakan, “Untuk bimbingan skripsi dan tugas akhir, dosen dapat memilih sejumlah aplikasi *daring*, misalnya melalui email untuk draft skripsi, dan *zoom* untuk melakukan *video conference*, hari ini baru *trial* dan besok baru mulai bimbingan.” (Inibaru.id 18/3/2020).

Metode bimbingan skripsi melalui aplikasi *daring* menuai pro-kontra dikalangan mahasiswa dan dosen. Sebagian mahasiswa mengeluhkan metode bimbingan skripsi melalui aplikasi *daring* dirasakan kurang efektif dibanding bimbingan secara tatap muka langsung. Mahasiswa terkadang kesulitan memahami arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing melalui aplikasi *daring*. Berikut ini tanggapan mahasiswa dan dosen mengenai bimbingan skripsi secara *daring*.

1. Mahasiswa Ilmu Perpustakaan UNDIP mengatakan, “kalau menurutku agak ribet kuliah *daring* karena kita bimbingan skripsi, jadi jauh lebih enak tatap muka, jadi bisa tanya permasalahan kita”. (linetoday 18/3/2020)

2. Menurut dosen program studi ilmu perpustakaan mengatakan, “Kuliah *daring* merupakan tantangan baru untuk belajar dengan teknik 4.0.” (linetoday 20/3/2020).

Kuliah *daring* sudah hampir satu tahun berjalan, metode perkuliahan yang dijalani oleh mahasiswa dari rumah masing-masing tentunya menimbulkan rasa bosan dikarenakan mereka tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan teman-teman, belum lagi ditambah masalah jaringan internet yang sering terkendala. Beberapa mahasiswa juga ada mengeluhkan kondisi keadaan rumah atau lingkungan rumah tempat tinggal mereka yang kurang kondusif saat melakukan kuliah *daring*.

Pembagian waktu untuk mengikuti kuliah dengan kegiatan di rumah yang sering bersinggungan. Beberapa mahasiswa juga mengaku menjadi kurang disiplin saat kuliah *daring*, karena mereka dapat mengikuti kuliah dengan berbaring ‘tiduran’, bahkan tak jarang mereka tertidur saat kuliah berlangsung. Kendala-kendala yang dialami tersebut dapat menyebabkan ketidaknyamanan psikologis, jika hal ini tidak mendapat perhatian maka akan menyebabkan mahasiswa kehilangan *sense of control* yang diakibatkan transisi dari pembelajaran tatap muka langsung menjadi pembelajaran jarak jauh menggunakan metode kuliah *daring*. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, memberikan tanggapan, “beberapa aspek budaya perlu menjadi perhatian terkait bagaimana mengatasi kendala psikologis dalam pembelajaran jarak jauh”.

Berikut ini adalah tanggapan dari dosen maupun mahasiswa mengenai suka duka kuliah *daring* :

1. Mahasiswa Ilmu Komunikasi 2019 mengatakan, “menurut saya keefektifan belajar dengan metode kuliah *daring* sebesar 5 dari 10 nilai. Itu karena materi yang didapatkan hanya berupa tulisan dan tugas saja, tanpa adanya pemahaman langsung dalam bentuk *vocal* maupun video. Meski tidak semua dosen seperti itu.” (lpmopini, oktober 2020)
2. Mahasiswi Ilmu Kelautan Undip angkatan 2019 mengatakan, “Kulon sampai akhir tahun itu efektif ga efektif sih. Gimana ya, Kulon tuh ga manusiawi aja. Tanggal merah ditrabas, kuliah ga sesuai jadwal, praktikum ga sesuai jadwal, dosen jelasin di WA Grup, kalau ngetik ada yang disingkat bikin mikir, ini nulis apa ya ? gitu. Terutama praktikum sih ya, harus lihat dari *youtube* caranya, padahal dari pengalaman semester 1 praktikum yang kita lakukan dengan yang ada di *youtube* tuh pasti ada bedanya, ditambah semester 3 ada praktikum *sedimentology*, yang mana harus mengamati specimen kita, praktikum dari jam 8 malem sampai 3 pagi, kebayang ga kalau *online* bagaimana?” (lpmopini, 21/6/2020)
3. Mahasiswa Fakultas Hukum Undip mengatakan “ beban tugas semua menjadi *online*, kalau didukung dengan fasilitas memadai untuk kuliah *online* sih oke, tetapi tidak semua mahasiswa memiliki fasilitas yang mendukung kuliah *online*, seperti laptop , sinyal dan lainnya, saya harapkan kuliah dapat berjalan seperti biasa lagi, yang saya rasa lebih optimal dan lebih efektif.” (lpmmanunggal, 7/4/2020)

4. Mahasiswi Ilmu Komunikasi Undip angkatan 2019 mengatakan, “sebenarnya campur aduk antara senang dan sedih, sedihnya aku merasa yang didapat selama kuliah *daring* tidak sebanyak selama kuliah *offline*, terus banyak banget kendalanya. Senangnya karena kita tidak dipaksa untuk tetap masuk, jujur meskipun aku ingin kuliah *offline*, tapi aku takut kuliah dengan kondisi seperti ini, mahasiswanya kan asalnya banyak dari beberapa kota.” (lpmopini, 21/6/2020)
5. Mahasiswi Administrasi Publik Undip angkatan 2020 mengatakan, “kalau aku sendiri, penyampaian materi oleh dosen lebih efektif jika dilakukan secara *offline*, selebihnya penyampaian materi bisa dipahami sendiri” (lpmopini , oktober 2020)
6. Mahasiswi D4 Bahasa Asing Undip, mengatakan “aku kan anak Bahasa, di kelas kerjanya nulis sama ngomong, nah aku orangnya gampang ke *distract*, kalau nugas dikelas dan dikumpul hari itu juga aku susah fokus, tapi sejak kuliah *daring* nugas itu lancar jaya, karena aku terisolasi dari orang lain tidak terdistraksi. Aku ga butuh lab juga sih, jadi gamasalah *online* juga sih. Tapi dukanya jujur aku merasa buat belajar tuh turun banget, entah karena sudah tertanam yang namanya belajar tuh kudu siap siap , ganti baju, ke kelas , terus ketemu orang atau entah karena nyepelein kuliah gara gara bisa rebahan, nonton drakor, malah bisa sambal tidur yang penting absen.” (lpmopini, 21/6/2020)
7. Dosen Fakultas Ilmu Budaya Undip mengatakan, “ kadang kadang, sinyal internetnya kurang mendukung, dank arena kuliah *daring* mata saya cepat capek karena harus didepan laptop terus, kalo saya lebih senang kuliah *offline*

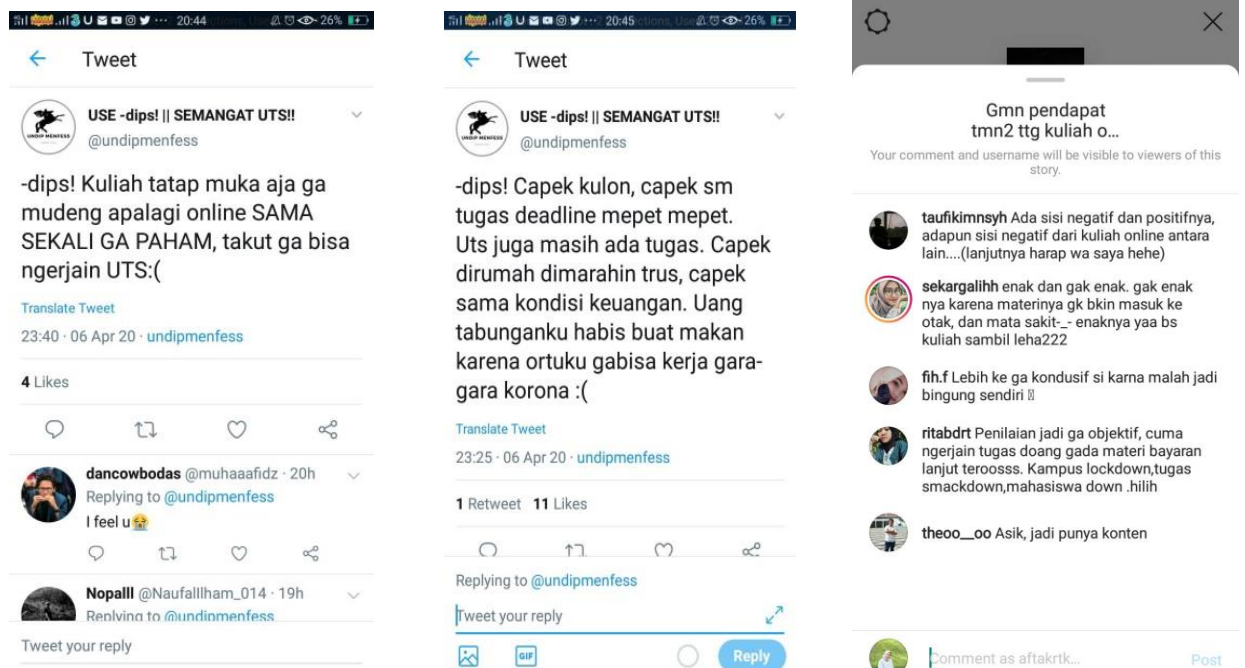
(dikelas) karena tidak hanya duduk didepan laptop, bisa jalan sana sini, bisa pindah dari kelas satu ke kelas yang lain, dari gedung satu ke gedung yang lain.”

(lpm manunggal 7/4/2020).

8. Biro Administrasi Perencanaan Riset dan Sistem Informasi (BAPSI) menyampaikan terkait dampak kuliah *daring* terhadap kegiatan perkuliahan yang menjadi tidak maksimal. Namun, hal tersebut bisa diantisipasi dengan kreativitas dosen. Misalnya, apabila penyampaian secara *conference/streaming* bermasalah, dosen bisa menyiapkan materi dalam bentuk video yang bisa dilihat di *Youtube* atau *Google Drive* dan memberi akses tak terbatas bagi mahasiswa.

Gambar 1.4

Contoh cuitan Mahasiswa Undip



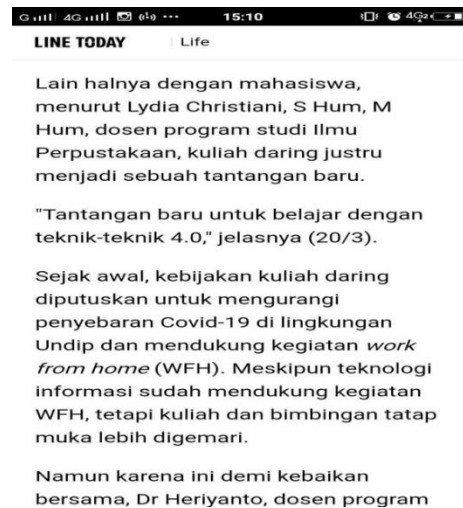
Hal itu disampaikan Ketua FRI Yos Johan Utama dalam Konferensi [Forum Rektor Indonesia \(FRI\)](#) yang digelar virtual, Sabtu (4/7/2020).

Acara tersebut turut diikuti oleh Presiden Joko Widodo serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

"Dalam masa pandemi ini, pemerintah diharapkan membantu mahasiswa dan dosen dalam proses pendidikan yakni dengan kebijakan membebaskan atau paling tidak menanggung pembiayaan internet bagi mahasiswa dan dosen," ujar Yos Johan.

Rektor Universitas Diponegoro itu menyebut, biaya internet cukup memberatkan mahasiswa dan dosen selama perkuliahan daring.

Oleh karena itu, pembebasan biaya internet ini sangat dibutuhkan.



Sumber : *Line Todays*

Gambar 1.4 menunjukkan contoh cuitan Mahasiswa Undip mengenai keluhan yang di hadapi dalam mengikuti kuliah *daring*. Implementasi kuliah *daring* dengan keharusan untuk tetap memperhatikan *learning outcome* bukan semata menjadi tanggung jawab dosen semata. Tanggapan dari dosen dan mahasiswa yang lebih banyak menyuarakan keluhan akibat adanya kendala-kendala yang ditemui saat melakukan kuliah *daring* mengindikasikan adanya permasalahan yang muncul saat implementasi kuliah *daring* di Universitas Diponegoro.

Permasalahan yang terjadi patut menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan di kampus untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran kuliah *daring*, sehingga tetap dapat memperhatikan *learning outcome* sesuai yang diamanatkan dalam Surat Edaran Rektor Nomor 20 /UN.7.P/SE/2020 dan Surat Edaran Nomor 23/UN7.P/SE/2020. Mengingat pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung tanpa tahu kapan akan berakhir, upaya untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul saat implementasi kuliah

daring dan melakukan perbaikan metode kuliah *daring* menjadi tanggung jawab seluruh civitas akademika Universitas Diponegoro, baik dosen, mahasiswa dan juga pihak kampus yang mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan di Universitas Diponegoro.

Penulis dalam menulis penelitian ini, melihat penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian. Sehingga dapat memperkaya teori yang akan digunakan untuk mengkaji penelitian ini.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No. (1)	Nama, Judul, Nomor,Tahun (2)	Tujuan dan Metode Penelitian (3)	Hasil (4)	Perbedaan (5)
1.	Faridah Nurlaila Zunaidah (2020). “Implementasi Perkuliahan <i>Daring</i> Matakuliah Pendidikan Laboratorium IPA Pada Masa Pandemi” Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara, Vol.6 No.1	Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi perkuliahan <i>daring</i> matakuliah pendidikan laboratorium IPA pada mahasiswa PGSD semester 4 selama masa pandemi Covid-19. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif	Hasil dari penelitian ini adalah perkuliahan <i>daring</i> pendidikan laboratorium ipa terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pemberian tugas terstruktur berupa laporan hasil kegiatan praktikum	Penelitian yang dilakukan oleh Faridah Nurlaila Zunaidah membahas tentang implementasi perkuliahan <i>daring</i> tetapi fokusnya hanya untuk matakuliah pendidikan laboratorium ipa, teori yang digunakan tidak dibahas dengan detail. Sedangkan Penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang implementasi kuliah <i>daring</i> di Universitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Diponegoro dengan menggunakan teori Leo Agustino dan apa saja faktor

				penghambat implementasi berdasarkan teori Van Metter & Van Horn (1975)
2.	Sulia Ningsih (2020). "Implementasi Pembelajaran <i>Daring</i> Berbasis <i>Edmodo</i> Pada Mata Kuliah Evaluasi Program Kepelatihan Di Masa Pandemi Covid-19" Jurnal Teknologi Pendidikan, VOL.13, No.2	Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi pembelajaran <i>daring</i> berbasis <i>edmodo</i> yang digunakan untuk pembelajaran <i>daring</i> pada mata kuliah Evaluasi Program Kepelatihan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemilihan <i>edmodo</i> sebagai media pembelajaran <i>daring</i> pada mata kuliah Evaluasi Program Kepelatihan didasarkan pada analisis kebutuhan mahasiswa dengan alasan kemudahan dan penguasaan aplikasi. (2) Perencanaan pembelajaran <i>daring</i> berbasis <i>edmodo</i> tergambar di rencana pembelajaran semester (RPS); (3) Implementasi pembelajaran <i>daring</i> berbasis <i>edmodo</i> dilaksanakan berdasarkan RPS dengan baik dan lancar; (4) <i>Edmodo</i> membantu pelaksanaan evaluasi pembelajaran untuk mengukur hasil belajar mahasiswa.	Penelitian yang dilakukan oleh Sulia Ningsih membahas tentang implementasi pembelajaran <i>daring</i> berbasis <i>Edmodo</i> , <i>Edmodo</i> merupakan media pembelajaran <i>daring</i> . Sedangkan Penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang implementasi kuliah <i>daring</i> di Universitas Diponegoro dengan menggunakan teori Leo Agustino dan apa saja faktor penghambat implementasi berdasarkan teori Van Metter & Van Horn (1975).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Mursyid Kasmir Naserly (2020) "Implementasi Zoom, Google Classroom, dan WhatsApp Group	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengan	Hasil penelitian menunjukan bahwa masing-masing media pembelajaran <i>daring</i> tersebut memiliki	Penelitian yang dilakukan oleh Mursyid Kasmir Naserly membahas mengenai

	dalam Mendukung Pembelajaran Pemebalajaran <i>Daring(Online)</i> pada Mata Kuliah Bahasa Inggris Lanjut (Studi Kasus pada 2Kelas Semester 2, Jurusan Administrasi Bisnis, FEB, Universitas BSI Jakarta)" Jurnal Aksara Public , Vol.4, No.2	alisis pemanfaatan berbagai <i>platform online</i> yang dapat digunakan sebagai media penunjang pembel ajaran <i>daring</i> dalam mata kuliah bahasa inggris lanjut. Beberapa <i>platform</i> yang dimanfaatkan adalah <i>Zoom</i> sebagai media <i>live streaming</i> , <i>Google Classroom</i> sebagai media interaksi kelas virt ual berbasis web, dan <i>WhatsApp group</i> untuk mendukung interaksi yang lebih ringkas dalam kelas <i>daring</i> berbasis <i>platform</i> chat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif sehingga pemanfaatan ketiga platform digital tersebut dapat diteliti lebih rinci mulai dari kelemahan hingga kelebihan masing-masing.	kelebihan dan kelemahan dan perlu adanya evaluasi agar pembelajaran <i>daring</i> dapat berjalan secara efektif	implementasi pembelajaran <i>daring</i> yang menggunakan 3 aplikasi tetapi lokus penelitian sangat sempit yaitu hanya pada 2 kelas jurusan administrasi bisnis di univeristas BSI Jakarta. Sedangkan Penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang implementasi kuliah <i>daring</i> di Universitas Diponegoro dengan menggunakan teori Leo Agustino dan apa saja faktor penghambat implementasi berdasarkan teori Van Metter & Van Horn (1975).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Alfian Rajo Mangkuto dan Kendry Widiyanto. (2019). "Implementasi	Bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan <i>E-learning</i> dalam meningkatkan kualitas	hasil penelitian ini diketahui bahwa implementasi kebijakan <i>E-learning</i> telah sesuai dengan	Penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang implementasi kuliah <i>daring</i> di Universitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kebijakan <i>E-Learning</i> dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Surabaya."	Bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan <i>E-learning</i> dalam	kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan yakni	Diponegoro dengan menggunakan teori Leo Agustino dan apa saja faktor

	Jurnal Penelitian Administrasi Publik Untag Surabaya Vol.5 No.2	meningkatkan kualitas pendidikan Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif secara deskriptif menggunakan teknik observasi,wawancara secara mendalam dan dokumen yang relevan.	meningkatnya prestasi akademis dan non akademis pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Surabaya.	penghambat implementasi berdasarkan teori Van Metter & Van Horn (1975). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Alfian Rajo Mangkuto dkk membahas tentang konteks kebijakan yang dilihat dari kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan tersebut.
5.	La Ode Anhusadar (2020) “Persepsi Mahasiswa PIAUD terhadap Kuliah Online di Masa Pandemi Covid-19” <i>Journal of Islamic Early Childhood Education</i> , Vol. 3, No. 1, April 2020	Bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang kuliah <i>online</i> , untuk mengetahui bentuk-bentuk aplikasi yang digunakan dalam kuliah <i>online</i> dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat dalam kuliah <i>online</i> . Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian survey deskriptif, sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa PIAUD semester 4 IAIN Kendari. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan angket	Hasil penelitian ini yaitu mahasiswa melakukan perkuliahan kebanyakan dirumah, tetapi ada juga yang dikebun dan dirumah tetangga yang mempunyai jaringan internet yang bagus, dan rata-rata mahasiswa kadang-kadang memahami materi kuliah , kadang-kadang tidak.	Penelitian yang dilakukan La Ode Anhusadar membahas tentang persepsi mahasiswa PIAUD mengenai kuliah <i>online</i> yang dijalankannya, bagaimana materi yang diberikan paham atau tidak. Sedangkan Penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang implementasi kuliah <i>daring</i> di Universitas Diponegoro dengan menggunakan teori Leo Agustino dan apa saja faktor penghambat implementasi berdasarkan teori Van
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Metter & Van Horn (1975)
6.	Selamat Riadi, Ellyn Normelani, Muhammad Efendi	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ipersepsi	Hasil dari penelitian ini tempat yang digunakan untuk	Penelitian yang dilakukan oleh Selamat Riadi dkk

	dkk (2020) “Persepsi Mahasiswa Prodi S1 Geografi FISIP ULM Terhadap Kuliah <i>Online</i> Di Masa Pandemi Covid-19” Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi Volume 2 No.2 Mei 2020	mahasiswa mengenai kuliah online, aplikasi apa yang digunakan, mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam kuliah <i>online</i> tersebut. Metode penelitian ini deskriptif kuantitatif, sampel penelitian adalah mahasiswa Program Studi S1 Geografi FISIP ULM Angkatan 2019. Teknik Pengumpulan data menggunakan wawancara dan angket	kuliah yaitu rumah masing-masing mahasiswa, sedangkan lebih daring 50% menyatakan jaringan internet yang dimiliki untuk kuliah tidak ada. Dan kendala sebagian besar mahasiswa adalah mahasiswa kurang memahami materi yang diberikan	adalah membahas mengenai persepsi mahasiswa terhadap keberlangsungan kuliah <i>online</i> . Sedangkan Penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang implementasi kuliah <i>daring</i> di Universitas Diponegoro dengan menggunakan teori Leo Agustino dan apa saja faktor penghambat implementasi berdasarkan teori Van Metter & Van Horn (1975)
7.	Agus Kusnayat, Moh.Hifzul Muiz dkk (2020) “Pengaruh Teknologi Pembelajaran Kuliah <i>Online</i> di Era Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Mental Mahasiswa” Jurnal Edukasi dan Teknologi Pembelajaran , Vol.1 No.2	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mental mahasiswa dalam menghadapi kuliah <i>online</i> selama covid-19, metode penelitian ini yaitu <i>mix methods</i> dengan melakukan analisa statistik parametris dan non parametris dilanjutkan deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah sebagian mahasiswa siap beradaptasi dengan kuliah <i>online</i> dan sebagian mahasiswa keberatan terhadap tugas yang diberikan selama kuliah <i>online</i> ini dan juga lebih banyak mahasiswa yang memilih lebih suka pembelajaran tatap muka.	Penelitian yang dilakukan oleh Agus Kusnayat dan Mh.Hifzul Muiz membahas tentang hubungan yang erat antara kuliah <i>online</i> dengan sikap mental mahasiswa. Sedangkan Penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang implementasi kuliah <i>daring</i> di Universitas Diponegoro dengan menggunakan teori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Leo Agustino dan apa saja faktor penghambat implementasi berdasarkan teori Van

				Metter & Van Horn (1975)
8.	Pripriono Tri Febrianto (2020) “Implementation of Online Learning during the Covid-19 Pandemic on Madura Island, Indonesia” <i>International Journal of Learning, Teaching and Educational Research</i> , Vol.19, No.8	Penelitian ini bertujuan untuk menentukan proses pembelajaran <i>daring</i> dan rintangan-rintangan terkait yang dialami siswa, dengan latar belakang Covid-19 yang berlangsung, penelitian ini berupaya mengungkap apa yang dilakukan siswa terkait dengan kebijakan baru untuk <i>online</i> . Metode penelitian ini yaitu kuantitatif.	Hasil dari penelitian ini adalah tidak semua siswa menyukai belajar online. Faktor sosial, ekonomi, budaya adalah indikator penting bahwa pembelajaran <i>online</i> belum mampu dilakukan efektif di sejumlah daerah di Indonesia.	Penelitian yang dilakukan oleh Priyono Tri Febrianto adalah membahas tentang siswa di Madura yang lebih suka pembelajaran tatap muka dibandingkan pembelajaran <i>online</i> . Sedangkan Penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang implementasi kuliah <i>daring</i> di Universitas Diponegoro dengan menggunakan teori Leo Agustino dan apa saja faktor penghambat implementasi berdasarkan teori Van Metter & Van Horn (1975)
9.	Nur Azizah, Wiwik Muhidayati, Erien Luthfia, Rina Utami (2020) “Implementation of Online Learning During the Covid-19 Pandemic Period in Supporting the Physical Distancing at Stikes Rajekwesi	Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan pelaksanaan pembelajaran <i>online</i> di Stikes Rajekwesi Bojonegoro dengan menggunakan metode penelitian deskriptif	Hasil dari penelitian ini adalah implementasi pembelajaran <i>online</i> ini memiliki hambatan baik dari mahasiswa, dosen maupun sistem aplikasi yang digunakan dan juga jaringan internet	Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah dkk membahas mengenai implementasi kuliah <i>online</i> yang membahas kendala dari dilaksanakannya kuliah <i>online</i> Sedangkan Penelitian yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Bojonegoro in 2020” Jurnal MIDPRO, Vol.12, No.2			penulis membahas tentang implementasi kuliah <i>daring</i> di Universitas Diponegoro dengan menggunakan teori

				Leo Agustino dan apa saja faktor penghambat implementasi berdasarkan teori Van Metter & Van Horn (1975)
10.	Ajeng Hadiati Sarjono dan Wachyu Sulistiadi. (2018). <i>“Analysis of Policy for The Improvement Capability of Internal Government Supervisory Apparatus(APIP) at Inspectorate General of Ministry of Health”</i> . <i>Journal of Indonesian Health Policy and Administration</i> . Vol.3, No.1	Tujuan penelitian ini adalah untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan kapabilitas APIP di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan metode analisis kualitatif	Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat beberapa kendala yaitu sosialisasi dilakukan baru sebatas pada sebagian pegawai Itjen belum dilakukan secara keseluruhan; belum ada Tim Khusus terhadap proses peningkatan kapabilitas APIP; pembagian waktu dan tugas belum jelas dan belum memiliki anggaran khusus; belum dibuat peraturan turunan dari Internal Audit Charter: belum ada sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> ; belum ada dokumentasi kertas kerja pengawasan; Kebijakan belum terinternalisasi	Penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang implementasi kuliah <i>daring</i> di Universitas Diponegoro dengan menggunakan teori Leo Agustino dan apa saja faktor penghambat implementasi berdasarkan teori Van Metter & Van Horn (1975) Sedangkan penelitian Ajeng dkk membahas tentang kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Tabel 1.1 menunjukkan penelitian terdahulu, yang memiliki judul atau fokus yang sama hanya beberapa penelitian saja. Penelitian yang lainnya lebih membahas diantaranya mengenai mengenai sistem aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran

daring, membahas mengenai kendala yang terdapat didalam aplikasi kuliah *daring*, dan membahas mengenai mental mahasiswa dalam melaksanakan kuliah *daring*.

Hal yang membedakan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah walaupun hampir sama membahas tentang implementasi kuliah *daring*, akan tetapi penulis membahas lebih dalam mengenai proses implementasi dari kuliah *daring* yang ada di Universitas Diponegoro dan aplikasi yang digunakan dalam kuliah *daring* yaitu *Microsoft Teams* sebagai media tatap muka dan aplikasi Kulon sebagai media untuk penyampaian materi, serta faktor penghambat apa yang terjadi dalam proses implementasi kuliah *daring* di Universitas Diponegoro dan upaya yang dilakukan agar implementasi tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan.

Berdasarkan penjelasan implementasi kuliah *daring* di Universitas Diponegoro di masa pandemi Covid-19 yang mengacu kepada Surat Edaran Rektor Nomor 20 /UN.7.P/SE/2020 dan Surat Edaran Nomor 23/UN7.P/SE/2020 bukannya tanpa masalah. Permasalahan yang terjadi dapat terindikasi dari keluhan dosen dan mahasiswa sebagai akibat adanya beberapa kendala yang ditemui saat melakukan kuliah *daring*. Oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian “Implementasi Kebijakan Kuliah Daring di Universitas Diponegoro.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis mengidentifikasi masalah yang ditemui dalam implementasi kuliah *daring* di Universitas Diponegoro :

- 1.) Masih ada sebagian dosen yang “gagap” menggunakan aplikasi digital yang digunakan dalam implementasi kuliah *daring*..
- 2.) Mahasiswa mengalami kesulitan untuk memahami materi yang diberikan dalam perkuliahan *daring*.
- 3.) Keharusan melaksanakan kuliah *daring* yang dilakukan dosen dalam bentuk video *streaming* interaktif dengan durasi 15 menit selama perkuliahan berlangsung.
- 4.) Keharusan penggunaan aplikasi “Kulon Undip” mulai awal semester ganjil di Agustus 2020, sehingga dosen dan mahasiswa harus menggunakan dua aplikasi saat kuliah *daring*.
- 5.) Keluhan yang diungkapkan oleh mahasiswa program kuliah S1, baik mahasiswa semester awal dan pertengahan yang masih aktif kuliah, maupun mahasiswa semester akhir yang sedang menyusun skripsi atau tugas akhir.

1.3 Rumusan Masalah

- 1.) Bagaimanakah implementasi kuliah *daring* di Universitas Diponegoro ?
- 2.) Apakah hambatan-hambatan dalam implementasi kuliah *daring* di Universitas Diponegoro ?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.) Untuk menganalisis implementasi kuliah *daring* di Universitas Diponegoro.
- 2.) Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat implementasi kuliah *daring* di Universitas Diponegoro.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi setiap pembaca khususnya dosen dan mahasiswa tentang implementasi kuliah *daring* di Universitas Diponegoro.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Bagi mahasiswa untuk memaksimalkan pembelajaran *daring*, sehingga membantu dosen dapat melakukan pengajaran yang optimal untuk mendapatkan *learning outcome* yang maksimal.

Bagi dosen dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang dialami dan dapat memberikan saran untuk perbaikan metode sesuai dengan jurusan tempat mengajar yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran saat memberikan materi melalui aplikasi *online*, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kuliah *daring*.

Bagi pihak universitas sebagai bahan masukan untuk mempersiapkan kurikulum berbasis *daring* yang lebih baik dan menjadikan civitas akademika Undip terbiasa dengan kuliah *daring*, sehingga dapat memenuhi target *learning outcome* yang diharapkan. Sehingga agar saat sewaktu-waktu harus diterapkan, dosen dan mahasiswa sudah terbiasa dengan pola perkuliahan secara *daring*.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Administrasi Publik

Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan dan informasi secara sistematis serta untuk memudahkan memperolehnya kembali. Administrasi dalam arti luas bisa dikatakan sebagai usaha kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan.

Istilah kata publik merupakan serapan dari bahasa Inggris public, yang juga memiliki dua makna atau bentuk. Pertama, sebagai kata benda (the public) yang berarti the community in general atau part of community having a particular interest in common. Kedua, sebagai kata sifat (public) yang dapat berarti sangat erat kaitanya dengan segala sesuatu yang menyangkut masyarakat atau orang banyak (Leo Agustino, 2016:7).

Menurut Waldo (dalam Pasolong, 2014:8), administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Berbeda dengan Edward H. Litchfield (dalam Inu Kencana Syafie 2010:25) administrasi publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan beberapa ahli dapat ditarik kesimpulan, bahwa administrasi publik merupakan manajemen dan organisasi dari manusia yang dilengkapi dengan tenaga-tenaga, dibiayai, digerakkan dan dipimpin

untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

1.6.2 Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hierarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Menurut Erwan Agus Purwanto dalam Dwiyanto Indiahono (2017), Kebijakan publik sering dipahami sebagai instrumen yang dipakai pemerintah untuk memecahkan masalah publik secara teknokratis. Dalam arti pemerintah menggunakan pendekatan *rational choice* untuk memilih alternatif terbaik guna memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat. Akan tetapi kebijakan publik pada dasarnya juga merupakan produk politik.

Menurut Thomas R. Dye dalam Budi Winarno (2012:20) kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Menurut Anderson dalam Sahya Anggara (2014:35) kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Kebijakan umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis

(political), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan.

Kebijakan publik memerlukan tahapan-tahapan karena menggunakan banyak sekali variabel untuk mendukung kebijakan yang akan ditentukan, para ahli yang berkecimpung dalam dunia kebijakan melakukan sebuah kajian untuk menentukan cara dalam melakukan proses kebijakan. Tahapan kebijakan publik menurut William Dunn (2013) dalam Budi Winarno (2012) adalah :

Tabel 1.2

Tahap Analisis Kebijakan Publik

Tahap	Karakteristik
Penyusunan Agenda	Pemilihan masalah yang akan dibahas dalam perumusan kebijakan dan akan di analisis
Formulasi Kebijakan	Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.
Adopsi Kebijakan	Dari sekian banyak kebijakan yang ditawarkan, dipilih salah satu alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas
Implementasi Kebijakan	Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.
Penilaian / Evaluasi kebijakan	Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

Tabel 1.2 merupakan tahapan analisis kebijakan publik yang dikemukakan oleh Willian Dunn yaitu mulai dari peyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan.

1.6.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu proses kebijakan publik. Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2016:130) Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2015:90) Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Grindle (Sahya Anggara, 2014: 149) mendefinisikan implementasi sebagai bentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai dampak dari suatu kebijakan pemerintah.

Menurut Wahab (Tahir,2014 : 55) bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang,

namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazim lainnya.

Implementasi menurut Pressman dan Wildavsky adalah “*to carry out, accomplish, fulfil produce, complete.*” (Nakamura,et,al, 1980, hal.13). Dari pengertian ini, implementasi dapat dikemukakan sebagai suatu kegiatan untuk menyempurnakan apa yang dikehendaki pembuat kebijakan, yang berarti pula menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Ripley dan Franklin sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007 :145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis iuran yang nyata.

Menurut Leo Agustino (2006:139) bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya kegiatan pencapaian tujuan atau pelaksanaan, adanya hasil kegiatan.

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis implementasi kuliah daring dilihat dari tiga hal yaitu adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya kegiatan pencapaian tujuan atau pelaksanaan, adanya hasil kegiatan.

1.6.3.1 Model Implementasi Kebijakan

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh van Metter & van Horn dalam Agustino (2016:133) disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut van Metter & van Horn (1975), yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik:

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

- 2) Sumber daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi

menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan.

3) Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana nya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi nya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter & Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu,

upaya untuk mengimplementasi kan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2015:94-99), ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*); (2) Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*); (3) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

1) Karakteristik Masalah:

Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan memengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

2) Karakteristik kebijakan :

- a) Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan men-terjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan
- b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoretis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.
- c) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya.
- d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horisontal antarinstansi yang terlibat dalam implementasi program.
- e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di Negara-Negara Dunia Ketiga, khususnya di Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program.
- g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi

masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.

3) Lingkungan kebijakan:

a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

b) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif,

c) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*). Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat memengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain: Kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan; Kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk memengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.

d) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

Merilee S. Grindle (dalam Sahya Anggara, 2014: 161) mengatakan keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target grup, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan di transformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.

e. Sumber daya yang dihasilkan

Konteks implementasinya adalah:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edward (Dwiyanto, 2017:31). Model ini menunjuk pada empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah

1) Komunikasi

Implementasi kebijakan akan dapat berjalan baik bukan hanya jika petunjuk dalam pelaksanaan atau implementasi dapat dipahami dengan baik, akan tetapi petunjuk tersebut juga harus jelas dan tepat dalam proses komunikasinya.

Terdapat tiga hal penting dalam komunikasi kebijakan, yakni:

- a) Transmisi, merupakan salah satu tahap penting dalam komunikasi dimana sebuah kebijakan harus dapat disalurkan dan melewati hambatan-hambatan lapisan hierarki birokrasi. Pertentangan pada tahap transmisi akan dapat menimbulkan distorsi atau masalah terhadap komunikasi kebijakan.

- b) Kejelasan, untuk dapat mengkomunikasikan suatu kebijakan dengan baik, maka petunjuk implementasi tersebut tidak hanya dapat diterima oleh seluruh aktor pelaksana, akan tetapi petunjuk implementasi tersebut juga harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi akan menimbulkan adanya perbedaan interpretasi antar aktor pelaksana dalam memahami sebuah kebijakan, dan dapat menimbulkan interpretasi yang salah sehingga bertentangan dengan tujuan suatu kebijakan.
- c) Konsistensi, jika implementasi kebijakan dapat berlangsung dengan efektif maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2) Sumber-sumber kebijakan.

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi menjadi tidak efektif dan berjalan baik. Dengan demikian sumber-sumber menjadi faktor yang penting dalam sebuah implementasi kebijakan publik.

Sumber-sumber kebijakan publik ini meliputi:

- a) Staf, merupakan salah satu variabel krusial dalam implementasi kebijakan. Staf dapat di golongkan menjadi dua yakni terkait dengan kuantitas dan kualitas yang dimilikinya.
- b) Informasi, meliputi tentang cara bagaimana melaksanakan suatu kebijakan, data tentang ketaatan aktor-aktor pelaksana terhadap suatu kebijakan yang dijalankan.

c) Wewenang, untuk dapat menjalankan suatu kebijakan dengan baik, maka diperlukan adanya kewenangan yang efektif dari aktor pemangku kepentingan. Kewenangan selalu bersifat khusus, sukarela ataupun paksaan, merupakan konsesi bagi mereka yang bersedia tunduk, dan diakui karena berbagai sebab.

d) Fasilitas, mencakup sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung atau menunjang jalannya suatu implementasi kebijakan. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, suatu kebijakan akan sangat sulit sekali untuk dijalankan.

3) Disposisi.

Disposisi atau kecenderungan-kecenderungan badan pelaksana mempunyai konsekuensi penting dalam implementasi kebijakan. Disposisi meliputi kognisi (Komprehensi atau pemahaman) badan pelaksana, tanggapan pelaksana atas penerimaan, netralitas, dan penolakan, serta intensitas tanggapan dari badan pelaksana.

4) Struktur birokrasi.

Birokrasi baik secara sadar ataupun tidak memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah untuk dapat mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Birokrasi juga merupakan sebuah institusi yang dominan dalam pelaksanaan kebijakan yang memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda pada masing-masing tahap implementasi kebijakan. Birokrasi bukan merupakan sesuatu yang netral dalam menentukan pilihan kebijakan-kebijakan mereka, dan tidak secara

penuh juga dikontrol oleh kekuatan-kekuatan yang berasal dari luar dirinya. Birokrasi mempunyai otonomi untuk melakukan tawar-menawar terhadap kebijakan yang akan mereka ambil. Untuk itulah dalam implementasi kebijakan perlu dipelajari tentang struktur birokrasi para badan pelaksana, *Standart Operating Procedure (SOP)* yang ada serta fragmentasi yang ada dalam badan pelaksana kebijakan.

Keempat variabel tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain.

Darwin (1999) dalam dalam Islamy 2001 menyatakan bahwa ada lima faktor yang menentukan tingkat implementabilitas kebijakan publik, yaitu:

- 1) Sifat kepentingan yang dipengaruhi

Dalam proses implementasi suatu kebijakan publik seringkali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan (*gainer*), sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain (*looser*).

- 2) Kejelasan manfaat

Jika dilihat dari aspek bermanfaat atau tidak, maka semakin bermanfaat implementasi kebijakan publik, dengan sendirinya dalam proses implementasi nantinya akan lebih mudah, dalam artian untuk waktu yang tidak begitu lama implementasi kebijakan dilaksanakan serta mudah dalam

proses implementasinya. Sebaliknya bila tidak bermanfaat maka akan sulit dalam proses implementasinya.

3) Perubahan perilaku yang dibutuhkan

Dalam hal ini pengambil kebijakan perlu menghindari pengambilan kebijakan yang menuntut perubahan perilaku terlalu jauh dan tentunya tidak bertentangan dengan agama, keyakinan atau pola hidup masyarakat yang sudah turun-temurun, karena lebih banyak implementasi kebijakan yang menuntut perubahan perilaku baik sedikit atau banyak, artinya pengambil kebijakan seharusnya memilih alternatif kebijakan yang paling kecil menimbulkan pengaruh pada perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat.

4) Aparat pelaksana

Diperlukan pengembangan aturan yang jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan transparan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya perilaku aparat yang berlawanan dengan tujuan publik tersebut. Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan agar lebih kritis dalam menyikapi perilaku aparat yang menyimpang, pilihan program merupakan upaya mengimplementasikan kebijakan *in built* mekanisme yang menjamin transparansi dan pengawasan, hal ini penting untuk mengarahkan perilaku aparat. Selain itu, kualitas aparat dalam melaksanakan proses implementasi pun menjadi kendala yang sering dijumpai. Terutama, menyangkut implementasi kebijakan yang membutuhkan keterampilan khusus. Dengan demikian memberikan indikasi bahwa aparat pelaksana kebijakan menjadi

salah satu aspek untuk menilai sulit tidaknya implementasi kebijakan. Komitmen, kualitas dan persepsi yang baik nantinya akan memudahkan dalam proses implementasi kebijakan dan sebaliknya. Aparat pelaksana atau implementator merupakan faktor lain yang menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak diimplementasi kan. Komitmen untuk berperilaku sesuai tujuan kebijakan penting dimiliki oleh aparat pelaksana.

5) Dukungan sumber daya

Suatu program dapat ter-implementasi dengan baik jika di dukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana , peralatan teknologi dan sarana serta prasarana lainnya. Kesulitan untuk melaksanakan suatu program terkait erat dengan beberapa hal yang disebut terakhir, bila sumber daya yang ada tidak mendukung maka implementasi program tersebut akan menemui kesulitan.

Kelima faktor yang menentukan sulit atau tidaknya proses implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Muhadjir Darwin sepertinya hanya diuraikan secara umum, dalam pengertian tidak dibedakan mana faktor organisasi serta mana faktor lingkungan. Oleh Effendi (2000) dikatakan bahwa perbedaan antara studi implementasi dengan penelitian ilmiah biasa terletak didalam variabel penelitian (khususnya *variable independent*).

Effendi (2000) dalam Agus Dwiyanto 2002 menyatakan ada 3 variabel independent (faktor pengaruh) yaitu:

1) Variable kebijakan

Yang termasuk variabel kebijakan adalah kejelasan tujuan kebijakan, transmisi (penyampaian kebijakan). Tujuan yang tidak jelas dan penyampaian kebijakan kepada implementator menimbulkan perbedaan persepsi. Kondisi ini akan menyulitkan dalam proses implementasi kebijakan nantinya.

2) Faktor organisasi

Satu kebijakan publik harus dilaksanakan melalui sebuah instrumen atau alat serta wahana tertentu, singkatnya tidak ada kebijakan publik tanpa terkait karena alat tertentu. Instrument untuk melaksanakan kebijakan publik ini dalam konteks administrasi negara dilaksanakan melalui organisasi atau organisasi publik (aparatur pelaksana).

3) Variabel atau faktor lingkungan implementasi

Suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh organisasi atau sekelompok organisasi tidak terjadi pada ruang hampa tetapi terjadi pada lingkungan implementasi tertentu. Lingkungan implementasi bisa berbentuk, kondisi Pendidikan masyarakat, kondisi sosial dimana kebijakan itu di implemmentasikan, serta kondisi politik.

Dari pendapat Effendi dan Darwin diatas, lima faktor yang disebutkan oleh Darwin dapat dimasukkan kedalam tiga faktor yang disebutkan oleh Effendi. Dimana, faktor kejelasan manfaat yang disebutkan oleh Darwin dapat dimasukan kedalam faktor kebijakan menurut Effendi, yaitu sejauh mana implementasi kebijakan tersebut menetapkan tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat atau kelompok sasaran. Kemudian faktor sifat kepentingan yang dipengaruhi dan perubahan perilaku yang

dibutuhkan menurut Darwin, dapat dimasukkan kedalam faktor lingkungan implementasi menurut Effendi. Sedangkan faktor aparat pelaksana dan sumber daya menurut Darwin dapat dimasukkan kedalam faktor organisasi implementasi menurut Effendi.

Dari uraian model implementasi kebijakan dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa, faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan antara 1) faktor internal yang terdiri dari : sumber daya manusia sebagai implementator dari suatu kebijakan, sasaran dari suatu kebijakan dan sarana/prasrana yang pendukung implementasi suatu kebijakan; dan 2) faktor eksternal yang terdiri dari : lingkungan sosial dan ekonomi.

Penelitian kali ini penulis menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kuliah daring di Universitas Diponegoro terdiri dari dua faktor yaitu faktor Internal dan Faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari : 1) faktor internal yang terdiri dari : sumber daya manusia sebagai implementator dari suatu kebijakan, sasaran dari suatu kebijakan dan sarana/prasrana yang pendukung implementasi suatu kebijakan; dan 2) faktor eksternal yang terdiri dari : lingkungan sosial dan ekonomi.

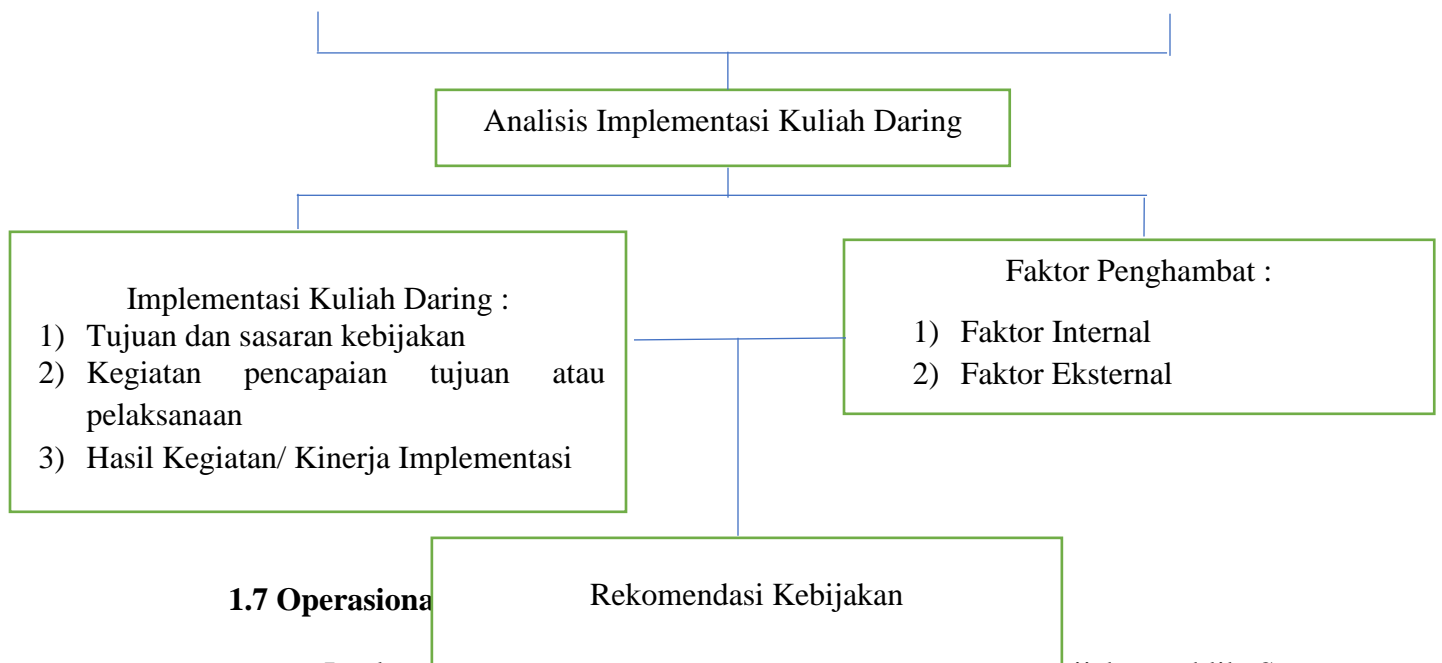
Kerangka Pikir Penelitian

Surat Edaran Rektor Nomor 20 /UN.7.P/SE/2020, menyebutkan :

Setelah tanggal 21 maret 2020 perkuliahan/pembimbingan dengan pola *daring* dengan menggunakan media pembelajaran daring dengan tetap memperhatikan *learning outcome*, dalam batas waktu tertentu dengan memperhatikan kondisi yang ada.

Permasalahan Kuliah Daring :

- Jaringan internet yang tidak sama di tiap daerah khususnya daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
- Ada beberapa dosen khususnya dosen senior yang sudah sepuh gagap teknologi.
- *Platform* Kulon Undip yang *server* sering



1.7 Operasional

Rekomendasi Kebijakan

Implementasi merupakan tahap yang penting dalam kebijakan publik. Suatu program atau kebijakan harus diimplementasikan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Implementasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana sebuah program atau kebijakan dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis

menganalisis implementasi kuliah *daring* di Universitas Diponegoro dari tiga hal yaitu: 1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan, 2) adanya kegiatan pencapaian tujuan atau pelaksanaan, 3) adanya hasil kegiatan.

Penelitian kali ini penulis menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kuliah *daring* di Universitas Diponegoro terdiri dari dua faktor yaitu faktor Internal dan Faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari :, penulis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan antara lain : 1) faktor internal yang terdiri dari : sumber daya manusia sebagai implementator dari suatu kebijakan, sasaran dari suatu kebijakan dan sarana/prasrana yang pendukung implementasi suatu kebijakan; dan 2) faktor eksternal yang terdiri dari : lingkungan sosial dan ekonomi.

Tabel 1.3
Operasional Konsep

No.	Fokus/Tujuan	Fenomena	Indikasi yang Diamati
1.	Implementasi kuliah <i>daring</i> di Universitas Diponegoro	Tujuan dan sasaran kebijakan	1.Persiapan Pelaksanaan
		Kegiatan pencapaian tujuan atau pelaksanaan	1. <i>Live streaming</i> 2. Aplikasi Kulon Undip
		Hasil kegiatan	1. IPK 2. Kompetensi mahasiswa
2	Faktor penghambat implementasi kuliah <i>daring</i> di Universitas Diponegoro	Faktor Internal	1. Kesiapan dosen 2. Kesiapan tenaga IT 3. Kesiapan mahasiswa 4. Kesiapan sarana dan prasarana
		Faktor eksternal	1.keadaan lingkungan sosial 2.keadaan ekonomi

Sumber : Penulis

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah langkah-langkah dalam penelitian, dilakukan sesuai prosedur dan sistematis yang berfungsi untuk menjelaskan proses penelitian di lapangan. Metode penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah pada penelitian untuk menguji data yang diperoleh di lapangan.

1.8.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Terdapat sebelas karakteristik pendekatan kualitatif, yaitu menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai instrument utama, menggunakan pengamatan wawancara atau studi dokumen untuk mencari data, menganalisis data secara induktif, menyusun teori dari bawah ke atas, menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, menggunakan kriteria tersendiri untuk memvalidasi data, menggunakan desain sementara yang dapat disesuaikan dengan kebenaran di lapangan, dan hasilnya dirundingkan dan disepakati bersama, hal tersebut dikemukakan oleh Moleong(2010).

Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis serta urutan-urutan kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan, sehingga data yang diperoleh dari narasumber perlu dijaring dengan metode yang lebih alamiah seperti

interview. Dalam pendekatan kualitatif terdapat dua tipe penelitian yaitu eksploratif dan deskriptif. Tipe eksploratif yaitu penelitian yang berusaha menggali atau mengetahui secara lebih mendalam terhadap suatu permasalahan. Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan gejala sosial tertentu. Penelitian deskriptif berusaha mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk menjelaskan sebab akibat .

Berdasarkan jenis penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan menggali fakta sebanyak-banyaknya dan menjelaskannya dengan pemahaman yang tepat dan jelas.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan tentang suatu fenomena secara alamiah yang terjadi pada sebuah lokus tanpa adanya manipulasi latar penelitian. Berdasarkan hal tersebut , tempat atau wilayah dimana penelitian dilaksanakan tentang analisis implementasi kuliah *online* di Universitas Diponegoro sebagai alternatif perkuliahan di masa depan . Sehingga lokus atau tempat/wilayah yang diambil adalah berdasarkan fokus penelitian yaitu Universitas Diponegoro.

1.8.3 Subyek Penelitian

Teknik pemilihan informan yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Subyek penelitian dalam hal ini adalah Wakil Rektor 1 Univeristas Diponegoro yang diharapkan peneliti dapat

menceritakan apa yang beliau ketahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan fenomena atau kasus yang diteliti. Wakil Rektor 1 sebagai *Purposive Sampling* karena dipertimbangkan secara cermat dan dinilai akan memberikan informasi yang akurat dan mencukupi. Kemudian Wakil Rektor 1 akan memilih fakultas mana saja yang akan diteliti lebih lanjut mengenai kuliah *daring*, ketika di fakultas Wakil Dekan 1 sebagai *purposive sampling*. Untuk kaprodi, dosen dan mahasiswa menggunakan teknik *snowball*. Teknik *snowball* dilakukan karena mencari sample yang awalnya dengan jumlah kecil, tetapi jika data yang didapat belum mencukupi, maka akan mencari lebih banyak narasumber dari dosen dan mahasiswa lainnya.

Tabel 1.4
Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Wakil Rektor 1 & Wakil Rektor 2	Informan utama
2.	Wakil Dekan 1	Informan utama
3.	Kaprodi	Informan utama
4.	Dosen Fakultas	Informan utama
5.	Tenaga IT	Informan utama
6.	LP2MP	Informan utama
7	Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Ketua Himpunan Departemen/Program Studi	Informan pendukung

1.8.4 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini berupa teks, kata-kata, foto dan sebagian berupa angka. Sumber data menurut Yanuar Ikbar (2012) terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Data primer adalah informan dimana peneliti dapat memperoleh data secara langsung dari sumber nya. Sumber dari data primer dalam penelitian adalah wawancara mendalam terhadap informan dan observasi langsung ke objek penelitian. Data primer ini diperoleh dari wakil rektor, wakil dekan dan dosen serta mahasiswa Universitas Diponegoro.

2. Data sekunder adalah data yang bersifat mendukung pembahasan. Data ini diperoleh dari bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bentuknya seperti sumber tidak langsung, seperti melalui buku, jurnal, literature, Koran, website resmi, media massa.

1.8.5 Sumber data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto. Sumber data diartikan juga sebagai asal mula dari suatu data yang diperoleh dengan secara langsung maupun lewat perantara.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang akan dipakai dalam riset harus benar, karena data yang salah akan

menghasilkan informasi yang salah. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui :

a. wawancara, merupakan teknik mengumpulkan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara dilakukan dengan *semi structured* yaitu penulis akan menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian di perdalam satu persatu sehingga hasil wawancara mendapat keterangan yang lengkap.

b. Dokumentasi , mencari dokumen berupa artikel di internet, Koran dan foto serta laporan yang sesuai dengan penelitian.

c. Penelitian Kepustakaan, teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku literature, gambar yang ada kaitannya dengan penelitian dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

1.8.7 Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara meng-organisasi kan data dalam kategori, menjabarkan unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan (Sugiyono, 2012). Adapun teknik atau tata cara urutan yang dilakukan yakni reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

1.8.8 Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif, bukan sedikit banyaknya informan yang menentukan validitas data yang terkumpul, melainkan salah satunya adalah ketepatan atau kesesuaian sumber data dengan data yang diperlukan. Teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh data valid adalah teknik triangulasi, menurut Sugiyono (2012) Triangulasi memiliki 3 jenis yaitu :

- 1) Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber
- 2) Triangulasi teknis yakni menguji keabsahan data dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya mengecek data hasil wawancara dengan observasi atau dokumentasi
- 3) Triangulasi waktu, yaitu menguji keabsahan data yang diperoleh dalam waktu yang berbeda

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini menguji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, dimana mengecek data yang diperoleh dari satu narasumber ke narasumber lainnya.